



## OPTIMALISASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MELALUI KARTU “PINTAR” DAN KREDIT SUPERMIKRO

Sony Hendra Permana\*)

### Abstrak

*Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai saat ini masih mengalami berbagai permasalahan, di mana banyak pelaku UMKM yang masih banyak kesulitan dalam mengakses KUR dan sebaran penyaluran KUR tidak merata di seluruh Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2018, Pemerintah akan melakukan perubahan dengan menerbitkan Kartu “Pintar” KUR. Namun, sebelum program tersebut dilaksanakan perlu dipertimbangkan agar biaya percetakan kartu tidak membebani nasabah maupun pelaku perbankan, memberikan informasi yang lebih luas tentang data nasabah dan profil usaha, kemudahan dalam mengakses kredit, serta adanya fleksibilitas angsuran khusus KUR sektor pertanian. Sebagai pelengkap KUR, Pemerintah juga akan meluncurkan kredit supermikro. Agar program ini berhasil, perlu juga dipertimbangkan untuk mengkombinasikan skema kredit supermikro dengan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal sekaligus mendukung program Strategis Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).*

### Pendahuluan

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah berjalan hampir sepuluh tahun semenjak diluncurkan pada 5 November 2007. Program ini merupakan upaya Pemerintah dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) untuk peningkatan akses ke sumber pembiayaan dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT Askrido dan Perum Jamkrindo. Pada tahun 2017

ini, Pemerintah telah menetapkan target penyaluran KUR sebesar Rp110 triliun. Sementara itu, realisasi penyaluran KUR di tahun 2016 lalu relatif sangat baik atau mencapai 94% dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp94,4 triliun. Penyaluran KUR ini terdiri dari KUR Mikro sebesar Rp65,6 triliun, KUR Ritel sebesar Rp28,6 triliun, dan KUR Penempatan TKI sebesar Rp177 miliar. Sektor perdagangan besar dan

\*) Peneliti Muda Ekonomi Terapan pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
E-mail: sony.hendra@dpr.go.id / sony\_hendra@yahoo.com



eceran merupakan sektor terbesar menerima KUR dengan porsi 66,29%. Sementara sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan mendapat porsi KUR sebesar 17,36%, sektor jasa-jasa sebesar 11,03%, sektor industri pengolahan sebesar 4,10%, dan sektor perikanan sebesar 1,22%. Selanjutnya, *Non Performing Loan (NPL)*/angka kredit macet KUR juga tercatat dalam posisi yang cukup baik, di mana secara rata-rata tercatat sebesar 0,37%, jauh dari batas yang ditetapkan yaitu sebesar 5%.

Meskipun capaian KUR tahun 2016 relatif sangat baik, namun masih banyak kendala di lapangan. Salah satu kendala yang paling sering ditemui adalah pelaku UMKM masih banyak kesulitan dalam mengakses KUR, meskipun Pemerintah telah berupaya untuk mendorong pertumbuhan kredit UMKM dengan menurunkan suku bunga KUR dalam dua tahun terakhir. Permasalahan ini diungkapkan oleh Pemerintah dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Koordinator Perekonomian pada tanggal 14 Februari 2017. Pemerintah menyebutkan bahwa bank terikat aturan yang mensyaratkan disiplin tinggi dan berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. Namun di sisi lain, pelaku UMKM sering kali tidak dapat memenuhi persyaratan bank tersebut.

Permasalahan lain yang juga muncul adalah sebaran penyaluran KUR tidak merata di seluruh Indonesia. Pada tahun 2016 saja, penyaluran KUR terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera. Wilayah Jawa menjadi wilayah yang tertinggi dalam penyaluran KUR dengan porsi sebesar 54,6%, di mana provinsi Jawa Tengah merupakan daerah paling besar dalam menyalurkan KUR dengan nominal sebesar Rp16,9 triliun. Selanjutnya wilayah Sumatera yang juga mendapatkan porsi penyaluran KUR yang cukup tinggi, yakni sebesar 20,2%, di mana provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi terbanyak dalam menyalurkan KUR di wilayah tersebut dengan jumlah Rp4,3 triliun. Di lain pihak, wilayah lain mendapat porsi penyaluran KUR yang jauh lebih rendah dibandingkan Jawa dan Sumatera. Hal ini terlihat dari porsi penyaluran KUR di wilayah Sulawesi yang hanya sebesar 9,4%, Bali Nusa Tenggara sebesar 7,4%, Kalimantan sebesar 6,1%, Papua sebesar 1,6%, dan Maluku

sebesar 0,7%. Berbagai permasalahan tersebut menuntut Pemerintah untuk membuat strategi-strategi baru agar program KUR dapat dijangkau oleh semua pelaku UMKM.

### Penyiapan Kartu “Pintar” KUR

Untuk memperbaiki kinerja penyaluran KUR, pada tahun 2018 mendatang pemerintah telah menyiapkan rancangan sistem penyaluran KUR agar lebih efektif dan efisien. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan menyiapkan kartu “Pintar” KUR yang akan terhubung dengan sistem penyaluran KUR milik bank maupun pemerintah. Dengan hadirnya kartu ini, masyarakat yang mengajukan KUR akan secara otomatis tercatat dalam kartu tentang informasi mengenai data pribadi dan profil usaha, serta transaksi kreditnya. Dengan demikian kartu “Pintar” KUR ini akan memiliki rekam jejak semua penerima manfaat KUR sehingga di kemudian hari bank akan dengan mudah dan cepat dalam memproses permohonan KUR yang diajukan lagi.

Selain itu, dengan hadirnya kartu “Pintar” KUR ini diharapkan pelaku usaha di sektor produksi seperti petani, peternak, hingga nelayan dapat menghitung nominal kredit yang diajukan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh jika petani membutuhkan pinjaman dalam satu kali panen dengan masa 6 bulan, maka nasabah tersebut tidak perlu meminjam dana dengan tenor selama 1 tahun. Kartu “Pintar” tersebut dapat melakukan kalkulasi terhadap tenor pinjaman selama 6 bulan, sehingga bunga yang biasanya dikenakan sebesar 9% per tahun, nasabah hanya dikenai bunga sebesar 4,5%. Pada tahap awal BRI, sebagai bank yang memiliki porsi terbesar dalam penyaluran KUR, akan diproyeksikan terlebih dahulu menyiapkan kartu pintar tersebut. Melalui sistem satelit yang dimiliki BRI, diharapkan penyaluran KUR dengan kartu tersebut dapat lebih efektif.

Rancangan yang telah disiapkan oleh pemerintah ini cukup baik sebagai terobosan dalam penyaluran KUR agar lebih efektif dan efisien. Namun demikian, terdapat hal-hal yang juga perlu mendapat perhatian sebelum rancangan ini dijalankan. *Pertama*, dengan diberlakukannya penggunaan kartu ini maka akan menimbulkan adanya biaya percetakan

dan pergantian kartu jika kartu tersebut hilang. Sebagai contoh jika tahap awal kebijakan ini dilakukan oleh BRI dengan asumsi biaya percetakan kartu sebesar Rp10.000 per kartu, maka biaya percetakan kartu akan sebesar Rp39,9 miliar, jika jumlah nasabah yang dilayani sama dengan tahun 2016. Dengan jumlah yang cukup besar ini maka perlu dipertimbangkan skema pembiayaan kartu tersebut agar tidak menjadi beban bagi nasabah maupun pelaku perbankan.

*Kedua*, informasi mengenai data dan profil usaha setiap nasabah yang mengakses kredit/pembiayaan ke sektor perbankan sesungguhnya telah ada pada sistem informasi perkreditan atau sistem informasi debitur yang sebelumnya telah dibangun oleh Bank Indonesia dan dapat diakses oleh semua perbankan. Dengan demikian, saat ini sebenarnya perbankan telah dapat mengetahui rekam jejak kredit nasabahnya pada lembaga keuangan. Oleh karena itu, penggunaan kartu tersebut harus memberikan nilai yang lebih dari hanya sekedar data nasabah dan profil usaha, namun juga memberikan informasi yang lebih banyak dan kemudahan-kemudahan dalam mengakses kredit/pembiayaan.

*Ketiga*, selain fleksibilitas tenor kredit/pembiayaan perlu juga dilakukan terobosan lain, misalnya dengan membuat skema KUR khusus pertanian yang memiliki fleksibilitas angsuran. Maksud dari skema KUR ini adalah angsurannya dapat dimulai pada bulan kedua atau ketiga semenjak kredit/pembiayaan diberikan, setelah usaha tersebut mulai memberikan hasil bagi nasabah. Dengan demikian, nasabah memiliki kemampuan membayar kredit/pembiayaan tersebut dan menghindari terjadinya NPL akibat gagal bayar.

Kebijakan untuk memberikan kemudahan mengakses permodalan untuk UMKM, merupakan upaya yang sangat baik dan akan memberikan semangat berusaha kepada masyarakat. Namun demikian, pemerintah harus dapat mengantisipasi timbulnya beban baru akibat biaya pembuatan dan pergantian kartu. Di samping itu, meningkatnya alokasi anggaran untuk KUR membutuhkan infrastruktur pengawasan yang bekerja secara efektif agar penyaluran KUR dapat tepat sasaran dan meningkatkan komitmen bank penyalur

yang ditunjuk untuk menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya.

## Rancangan Kredit Supermikro

Mengingat masih belum fleksibelnya KUR dalam memberikan kredit/pembiayaan, maka saat ini Pemerintah tengah menyiapkan skema baru sebagai pelengkap dari program KUR yang sudah berjalan. Skema baru tersebut adalah program kredit khusus supermikro untuk mereka yang tidak terjangkau oleh KUR. Rencananya Pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk subsidi bunga maupun sisi *plafond*-nya. Sementara itu, dalam hal penyaluran, direncanakan kredit ini disalurkan melalui BPD, koperasi, atau lembaga permodalan lainnya seperti BMT Ventura. Skema kredit yang ditawarkan dalam program ini adalah kredit dengan tenor yang lebih singkat dengan bunga yang lebih rendah. Dengan program ini diharapkan pemerintah akan lebih fokus dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan dan memenuhi variasi yang dibutuhkan untuk menjangkau kebutuhan permodalan masyarakat.

Gagasan ini sangat baik mengingat masih banyaknya pelaku usaha mikro yang belum dapat mengakses ke lembaga keuangan. Namun demikian, skema ini memiliki tantangan yang cukup besar, khususnya pada jumlah pelaku usaha mikro yang sangat banyak. Sebagai contoh, jika *plafond* kredit dialokasikan sebesar Rp500 miliar dengan rata-rata kredit sebesar Rp500.000,- per nasabah, maka jumlah nasabah yang dilayani mencapai 1 juta nasabah. Untuk itu diperlukan jaringan yang luas serta sumber daya manusia yang cukup banyak untuk skema ini.

Salah satu cara yang mungkin dapat ditempuh untuk efektivitas pelaksanaan skema ini adalah mengkombinasikannya dengan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), yaitu program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Program Laku Pandai ini menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami,

dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan, sama halnya dengan pelaku usaha mikro yang tidak dapat mengakses ke sektor keuangan formal. Agen bank dalam Laku Pandai ini mampu menjangkau daerah-daerah yang belum dijangkau oleh lembaga keuangan formal seperti perbankan dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Dengan penyaluran kredit supermikro melalui agen bank pada Laku Pandai, maka secara tidak langsung skema kredit supermikro ini juga mendukung program Strategis Nasional Keuangan Inklusif.

Terobosan kebijakan permodalan dalam bentuk kredit supermikro akan menjadi jawaban nyata dari pemerintah untuk memperluas kesempatan usaha mikro untuk memperoleh modal yang belum terjangkau oleh sektor keuangan formal. Alokasi anggaran yang disediakan untuk kebijakan ini dapat dikatakan masih terbatas dibandingkan dengan banyaknya usaha mikro di setiap daerah di Indonesia. Namun demikian, kebijakan ini memperlihatkan perhatian besar pemerintah untuk menggerakkan ekonomi dari skala yang terkecil.

## Penutup

Program KUR yang sudah berjalan selama hampir sepuluh tahun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya, antara lain masih banyaknya UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses KUR dan distribusi KUR yang belum merata. Untuk itu, pemerintah akan mencoba membuat kebijakan baru pada tahun 2018 dengan menerbitkan Kartu "Pintar" KUR dan meluncurkan skema kredit supermikro.

Dengan adanya terobosan kebijakan permodalan UMKM yang akan dilakukan pemerintah ini, maka DPR perlu melakukan pengawasan atas implementasi kebijakan tersebut agar hasil dari kebijakan ini dapat secara efektif dilaksanakan. Di samping itu DPR perlu melakukan pengawasan langsung kepada masyarakat agar manfaat dari kebijakan tersebut dapat dirasakan.

## Referensi

- "Akses KUR Masih Sulit: Kartu Debitur Disiapkan untuk 2018", *Kompas*, 15 Februari 2017.
- "Kredit Supermikro Disiapkan", *Media Indonesia*, 15 Februari 2017.
- "Laku Pandai: Sahabat Masyarakat", <http://www.ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.aspx>, diakses 16 Februari 2017.
- "Pemerintah Siapkan Kartu "Pintar" KUR", <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/02/14/174703426/pemerintah.siapkan.kartu.pintar.kur>, diakses 15 Februari 2017.
- "Pemerintah Siapkan Kredit Super Mikro Berbunga 4,5 Persen", <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170214183026-78-193531/pemerintah-siapkan-kredit-super-mikro-berbunga-45-persen/>, diakses 22 Februari 2017.
- "Penyaluran KUR 2016 Hampir 100%", <http://finansial.bisnis.com/read/20170209/90/627399/penyaluran-kur-2016-hampir-100>, diakses 15 Februari 2017.
- "Realisasi Penyaluran KUR per 31 Desember 2016", [http://kur.ekon.go.id/realisasi\\_kur/2016/12](http://kur.ekon.go.id/realisasi_kur/2016/12), diakses 15 Februari 2017.